idea
Ide dan Analitika Indonesia

2022 ANNUAL REPORT

A YEAR OF ACCOMPLISHMENT



PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA

INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

PENGANTAR iii

BAB I. PROFIL IDEA 1

Tentang IDEA 2

Visi Misi 3

Jati Diri 4

Rencana Strategis 5

Struktur Organisasi 7

Wilayah Kerja 8

BAB II. PROGRAM IDEA 9

Agenda Prioritas 1 10

- Memastikan Hak atas Kesehatan: Vaksinasi Covid 19 Inklusif bagi kelompok rentan 10
- Dari Kemiskinan Ekstrem Menuju Kesejahteraan Sosial 14

Agenda Prioritas 2 20

- Memperkuat Solusi Lokal untuk Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa: Bergerak dan Menyebarkan Cerita yang Berdampak 20
- Advokasi Anggaran Warga untuk Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang Inklusif 23
- Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia 25

Agenda Prioritas 3 31

- Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk mendukung Desa Mandiri Budaya 31
- Menuju SP4N LAPOR! yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 33

BAB III. PENGELOLAAN PENGETAHUAN 36

Agenda Prioritas 6 37

- Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi 38
- Pengembangan Unit Usaha Analitika Indonesia Konsultan (AIK) 39
- Penguatan dan Pengembangan Jaringan 39
- Analisis dan Kajian 41
- IDEA dalam Angka 44

BAB IV. TATA KELOLA KELEMBAGAAN IDEA 45

Agenda Prioritas 7 46

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 46
- Pengelolaan Program Magang (Internship Program) 47
- Kinerja Keuangan 48
- Refleksi Diri 48

PENGANTAR

Perkumpulan IDEA yang sudah berusia 27 tahun sangat bersyukur karena sebagai organisasi masyarakat sipil masih terus mengupayakan gerakan sosial di tengah situasi penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan pasca pandemi Covid 19 yang Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan.

Selama tahun 2022, IDEA mengimplementasikan program-program yang berkontribusi terhadap upaya pemenuhan hak ekosob warga, diantaranya adalah program vaksinasi Covid 19 yang inklusif dan program pendampingan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada pemerintah dan desa dan kelembagaan desa yang berkontribusi yang berkontribusi terhadap rencana strategis IDEA agenda prioritas 1. Selain itu, program Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur juga berkontribusi kepada agenda prioritas 1. Program memperkuat Solusi Lokal untuk Akuntabilitas Dana Desa Pemutakhiran Data Kemiskinan sebagai Pedoman Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang Inklusif Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia di Kabupaten Morowali Utara berkontribusi terhadap agenda prioritas 2 dalam renstra IDEA.

Upaya melaksanakan agenda prioritas 5 yaitu Penguatan Tata Kelola Lembaga sebagai Perkumpulan yang solid dan Berkelanjutan dengan memastikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kelembagaan secara internal berjalan tepat waktu.

Sementara itu, Agenda Prioritas 7 yaitu Peningkatan layanan IDEA sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi juga berjalan memaksimalkan divisi pengelolaan pengetahuan dengan memanfaatkan kanal sosial media dan pengelolaan sumberdaya pengetahuan dengan lebih maksimal. Agenda prioritas 6 yaitu Penguatan Penggalangan Sumberdaya masih belum dapat berjalan maksimal terutama untuk menggalang sumberdaya secara mandiri.

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak mitra IDEA yang telah mendukung upaya advokasi dan mendorong gerakan perubahan sosial untuk pemenuhan hak warga. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran informasi yang memadai dan kami menanti masukan dan saran dari para pembaca.

Tenti Novari Kurniawati
Direktur Eksekutif



BAB I
PROFIL IDEA



TENTANG IDEA

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dengan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih SH, M.Hum Nomor 25 Tanggal 22 April 2004, dan diperbaharui dengan Akta Notaris Athanasia Dhian Santi, SH, M.Kn Nomor 02 Tahun 2020. Akta tersebut telah diverifikasi dan diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor No. AHU-0000463.AH.01.08.Tahun 2020. Analitika Indonesia juga telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0220103611224. Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA memfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang - mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik.Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan dan keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

IDEA telah berperan dalam berbagai proses transformasi sosial selama kurun waktu 25 tahun organisasi ini didirikan. Peran-peran tersebut adalah mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia, menerbitkan berbagai penelitian dan buku tentang sistem penganggaran di Indonesia. IDEA terlibat dalam berbagai jejaring koalisi CSO dalam gerakan anti korupsi, gerakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, gerakan mendorong keterbukaan informasi publik, Open Government Partnership dan tata kelola industri ekstraktif, sumber daya alam, adaptasi iklim dan pengurangan resiko bencana.



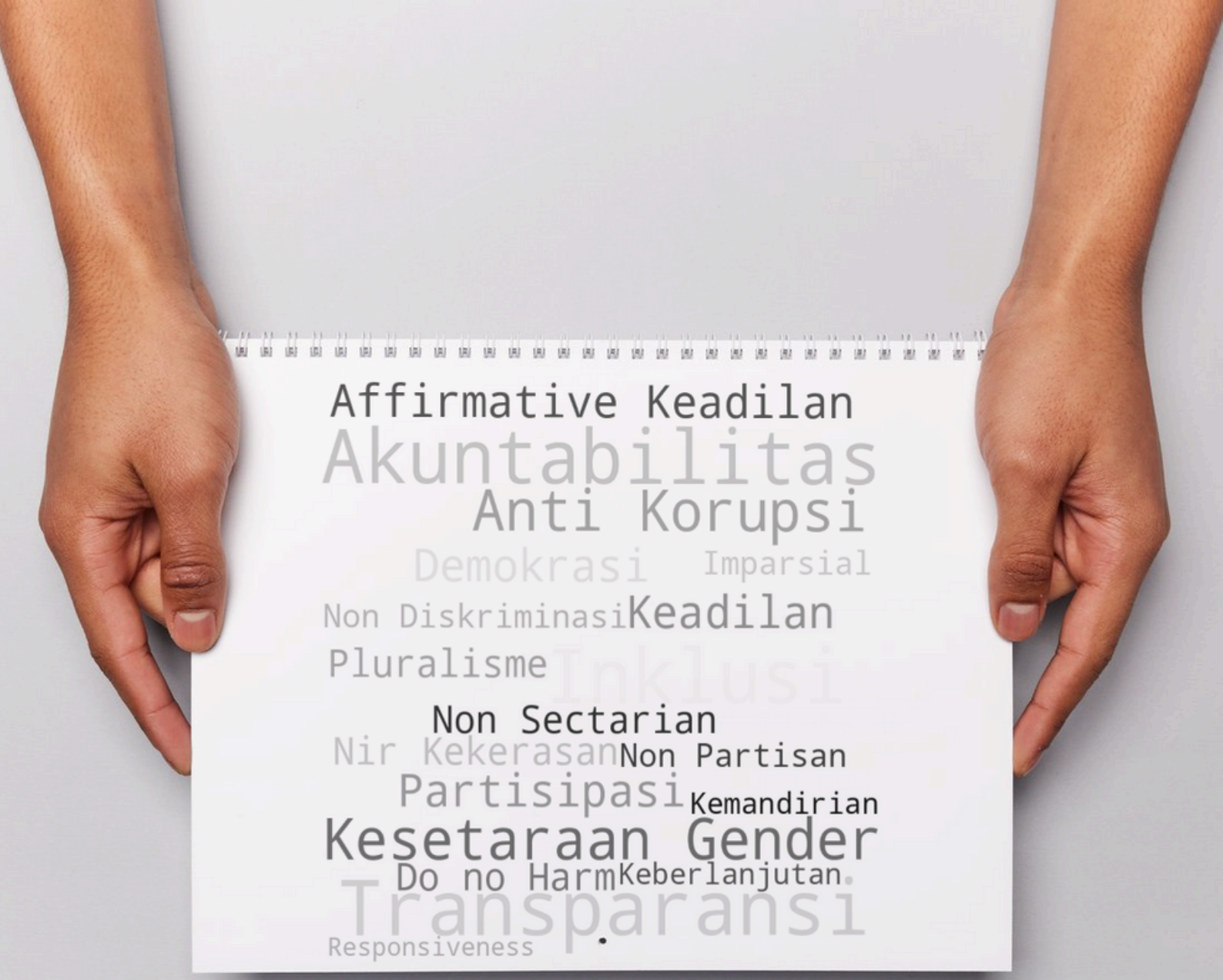
VISI

"Terwujudnya kedaulatan warga di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak dasar"

MISI

Misi yang digunakan IDEA untuk mencapai visinya adalah melalui:

- Penguatan kelompok-kelompok warga untuk perubahan alokasi sumberdaya publik yang lebih adil
- Mendorong perubahan kebijakan alokasi sumberdaya publik yang inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan
- Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku publik terhadap alokasi sumberdaya
- Menjadi organisasi yang kuat dan berkelanjutan



JATI DIRI IDEA

RENCANA STRATEGIS IDEA
AGENDA PRIORITAS 2022 - 2027

Agenda Prioritas 1

Mendorong kebijakan alokasi sumber daya publik yang inklusif, terpadu, adil gender, dan transparan, termasuk transparansi kontrak dan BO dan akuntabel di tingkat desa, kab/kota, provinsi serta nasional pada isu-isu:

- Layanan penanganan kemiskinan
- Penanganan Covid 19
- Pengurangan resiko bencana
- Kehutanan, lingkungan hidup dan perubahan iklim
- Sumber daya alam, Industri ekstraktif, transisi energi dan energi terbarukan

Agenda Prioritas 2

Mendorong peningkatan kesadaran publik dan khususnya warga terpinggirkan mengenai transparansi kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan akses informasi yang memadai

Agenda Prioritas 3

Membangun Warga Sebagai komunitas Cerdas yang memahami logika alokasi sumberdaya publik, aktif terlibat dalam penyusunan dan aktif mengakses informasi pelaksanaan alokasi sumberdaya publik termasuk dengan menggunakan teknologi daring.

Agenda Prioritas 4

Penguatan Demokrasi dalam Pemilu 2024

Agenda Prioritas 5

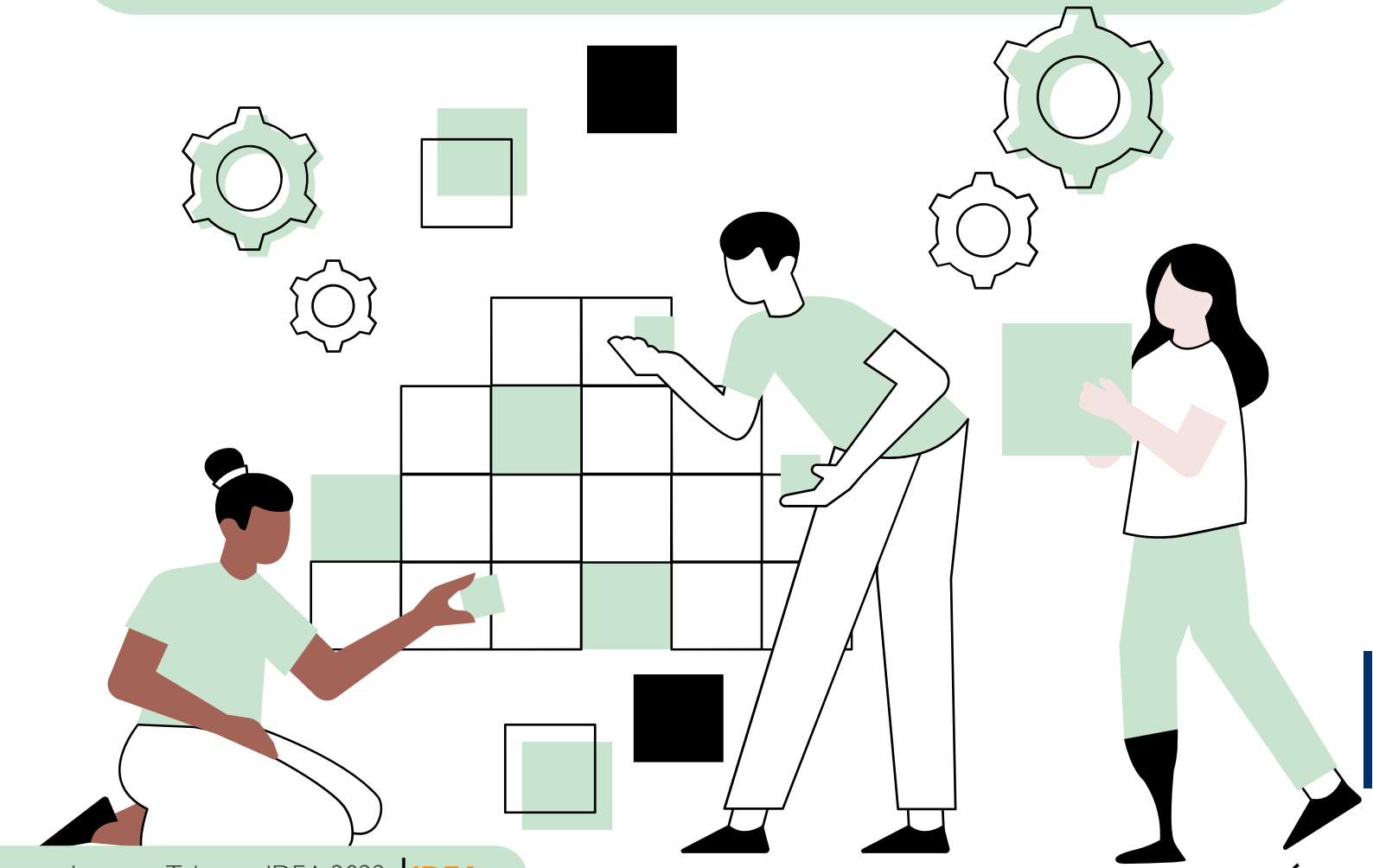
Penguatan Tata Kelola Lembaga sebagai Perkumpulan yang solid dan Berkelanjutan

Agenda Prioritas 6

Penguatan Penggalangan Sumberdaya

Agenda Prioritas 7

Peningkatan layanan IDEA sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi



STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA:

Achmad An'am Thamrin, Agam Fatchurrochman, Akhmad Nasir, Dati Fatimah, Deddy Heriyanto, Deni Purwo Sambodo, Farida Mahri, Maria Bernadette, Muchtar Abbas, Muhammad, Ridya La OdeNgkowe, Sri Hidayati, Sunarja, Tiem Farikhah, Valentina Sri Wijiyanti, Wahyu Widiarto, Wasingatu Zakiyah, Yohannes Da Masenus Arus, Sumarti Sukaningsih, Tenti Novari Kurniawati, Asri Budiarti, Anis Nuria Perwitasari, Ahmad Hedar, Desty Roosdiana Ika Kusumawati, Galih Pramilu Bakti, Muhammad Djindan, Muhammad Bustom, Yusnita Ike Christanti







PELAKSANA HARIAN:

Ketua Pelaksana Harian : Tenti Novari Kurniawati,
Manajer Pengelolaan Pengetahuan: Ahmad Hedar
Manajer Analitika Indonesia: Yusnita Ike
Manajer Program: Isnawati
Program Officer: Meigita Dyah Utami | Galih Pramilu Bakti | Ferina A.F
Staf Keuangan: Eny Sudarwati, Sari Biwantari, Sisca Dwi Tresnaningsih
Staf admin & Operasional: Hanik Kusumastuti | Andi Apriyanto | Wahyu Rusdiyanto

WILAYAH KERJA



WILAYAH PROVINSI

- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DAERAH KHUSUS JAKARTA
- JAWA TIMUR
- JAWA TENGAH
- KALIMANTAN BARAT
- SULAWESI SELATAN
- SULAWESI TENGAH
- SUMATERA UTARA
- NUSA TENGGARA TIMUR

WILAYAH KABUPATEN

- KABUPATEN BANTUL
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- KABUPATEN KULON PROGO
- KABUPATEN SLEMAN
- KOTA YOGYAKARTA
- KABUPATEN SUMENEP
- KABUPATEN BLITAR
- KABUPATEN SIDOARJO
- KABUPATEN BANYUWANGI
- KABUPATEN LAMONGAN
- KABUPATEN BELU
- KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- KABUPATEN SABU RAIJUA
- KABUPATEN SUMBA TIMUR
- KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- KABUPATEN SAMBAS
- KABUPATEN LUWU UTARA
- KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB II
PROGRAM IDEA TAHUN 2022



AGENDA PRIORITAS 1. MENDORONG KEBIJAKAN ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK YANG INKLUSIF, TERPADU, ADIL GENDER, TRANSPARAN (TERMASUK TRANSPARANSI KONTRAK DAN BO) DAN AKUNTABEL DI TINGKAT DESA, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI SERTA NASIONAL

MEMASTIKAN HAK ATAS KESEHATAN: VAKSINASI COVID 19 INKLUSIF BAGI KELOMPOK RENTAN

Status Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PP) di Provinsi DIY kembali naik per 7 Februari 2022 menjadi level 3. Padahal, sebelumnya, selama tiga bulan lebih, terhitung per 19 Oktober 2021 hingga 6 februari 2022, status di Provinsi DIY turun menjadi level 2. Status PP level 3 menunjukkan kembali naik nya angka infeksi dan penyebaran virus covid-19. Jika melihat angka kasus konfirmasi harian dalam 60 hari terakhir di Provinsi DIY, kasus penambahan di DIY memang mulai meningkat kembali sejak tanggal 6 Februari, saat itu tercatat ada 280 pasien konfirmasi positif covid-19, kasus kemudian meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada 24 Februari 2022 yang mencapai 2.866 pasien konfirmasi positif covid-19.

Dalam situasi demikian, percepatan program vaksinasi menjadi sangat penting untuk membentuk herd immunity di tengah-tengah masyarakat. Naiknya angka konfirmasi positif di DIY memang disebabkan oleh banyak variabel, seperti mutasi virus sars dari delta ke omicron, hingga kemungkinan turunnya eifikasi vaksin covid-19. Oleh karena itu, booster vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap mutasi virus covid-19 perlu dilakukan. Jika merujuk data dinas kesehatan DIY, vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk warga di DIY masih sangat rendah. Per 1 maret 2022, capaian vaksinasi dosis ketiga di DIY baru mencapai 10%, dengan jumlah penerima vaksin sebanyak 292.373. Sedangkan DIY

sendiri memiliki target sasaran vaksinasi sebanyak 2.879.699. Artinya masih sangat banyak dari jumlah sasaran tersebut yang perlu diintervensi vaksin dosis 3, terutama kelompok-kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Berdasarkan sasaran, jumlah vaksin dosis ketiga di DIY baru menyasar tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia dan umum.

Sasaran vaksinasi booster perlu dilakukan dengan memetakan prioritas kelompok rentan, terutama kelompok difabel yang secara data pilah belum cukup memadai. Berdasarkan kertas kebijakan yang disampaikan FPRB DIY ke pemerintah provinsi DIY, data pilah yang menunjukkan difabel terpapar Covid-19 tidak tersedia di laman website corona.jogjaprov.co.id. Sementara data pilah akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan serta implementasi dalam penanganan Covid-19 yang inklusif disabilitas.

Situasi tersebut terkonfirmasi dari fakta berikut:

1. Tidak tersampaikannya informasi yang memadai terkait Covid -19 yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses oleh difabel terutama difabel netra dan tuli.
2. Belum tersedianya data difabel yang meliputi: konfirmasi positif, dinyatakan sembuh, yang menjalani isolasi, telah divaksin, belum divaksin.
3. Tidak tersedianya shelter yang aksesibel bagi difabel terutama difabel netra dan fisik pengguna alat bantu kursi roda, sehingga terjadi penolakan pada difabel netra di salah satu shelter yang dikelola oleh pemerintah dan meminta difabel melakukan isolasi mandiri di rumah.
4. Penyelenggaraan vaksin bagi difabel oleh pemerintah yang dipisahkan dengan masyarakat umum dengan sistem kuota terpusat/ tersentral dan dibatasi waktu pelaksanaannya menyulitkan difabel dalam mengakses.



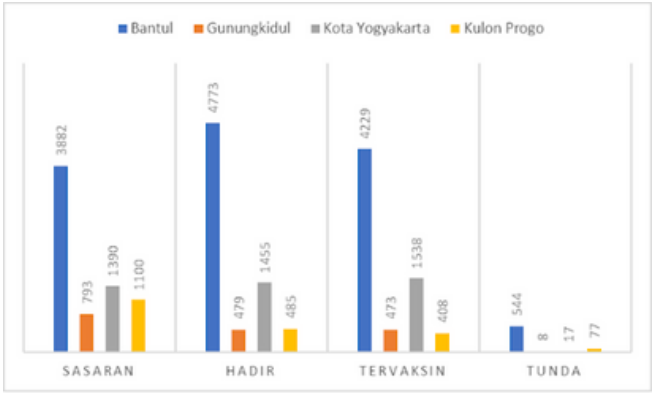
5. Tidak tersedianya edukasi vaksin yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjangkau difabel beserta keluarganya, sehingga terjadi beberapa penolakan vaksin oleh keluarga difabel.
6. Belum adanya kesempatan partisipasi difabel dalam upaya mitigasi dan penanganan Covid-19.

Peran Masyarakat Sipil dalam Kolaborasi Percepatan Vaksinasi Selama situasi pandemi, IDEA bersama dengan Yappika Actionaid, FPRB-DIY, SONJO serta beberapa kelompok masyarakat sipil dan individu di DIY turut berpartisipasi dalam melakukan akselerasi vaksinasi untuk kelompok rentan di DIY terutama untuk vaksinasi dosis ketiga (booster)

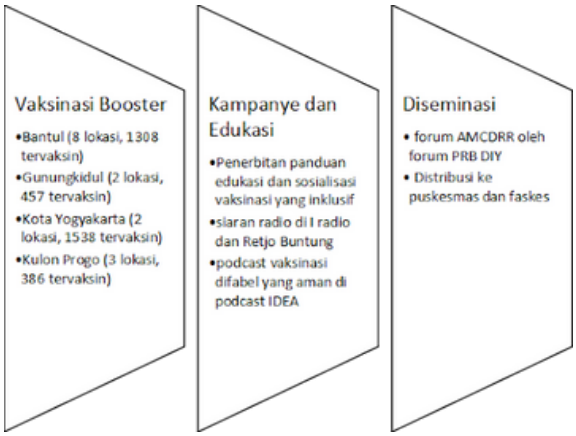
IMPLIKASI PROGRAM

Program vaksinasi booster yang inklusif mendukung percepatan program vaksinasi di DIY dengan total orang yang divaksin sekitar 1.148.838 atau atau 39,89% dari total 3.181.285 target sasaran. Rincian dari kelompok rentan yang telah divaksin bekerjasama dengan PKBI DIY adalah:

- Transpuan : 20 Orang
- Pekerja Seks : 36 Orang
- Difabel : 2 Orang
- Lansia : 51 Orang
- Warga dimarginalkan : 6 Orang
- Warga Surokarsan : 173 Orang
- Masyarakat Umum : 526 Orang



Selain vaksinasi untuk kelompok rentan dan masyarakat umum, program vaksinasi inklusif juga melaksanakan kampanye dan edukasi kepada publik dengan cakupan pendengar untuk edukasi dan sosialisasi melalui siaran radio di Retjo Buntung Jogja adalah I Radio adalah ribuan pendengar. Selain itu, siaran talkshow juga diredistribusi Idea ke publik melalui whatsapp group dan jejaring komunitas. Buku panduan vaksinasi inklusif selain didistribusikan ke puskesmas, kalurahan dan faskes lain, juga dipamerkan dan didistribusikan di forum-forum nasional, misalnya dalam acara Forum GPDRR. Yappika dan FPRB DIY berbagi dalam subtema Inclusion Advocacy for vulnerable groups in the COVID-19 pandemic response.



banyak orang. Resiliensi atau ketangguhan hanya dapat diwujudkan apabila upaya tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi kelompok rentan terlindungi dari penyebaran Covid 19 setelah vaksin booster.



Pelaksanaan Forum GPDRR (Global Platform Disaster Risk Reduction) di Bali, 23-28 Mei 2022. Di Forum tersebut, Yappika, Perkumpulan IDEA dan FPRB DIY berbagi dalam subtema Inclusion Advocacy for vulnerable groups in the COVID-19 pandemic response. Kredit Foto: UNDRR/Antoine Tardy.

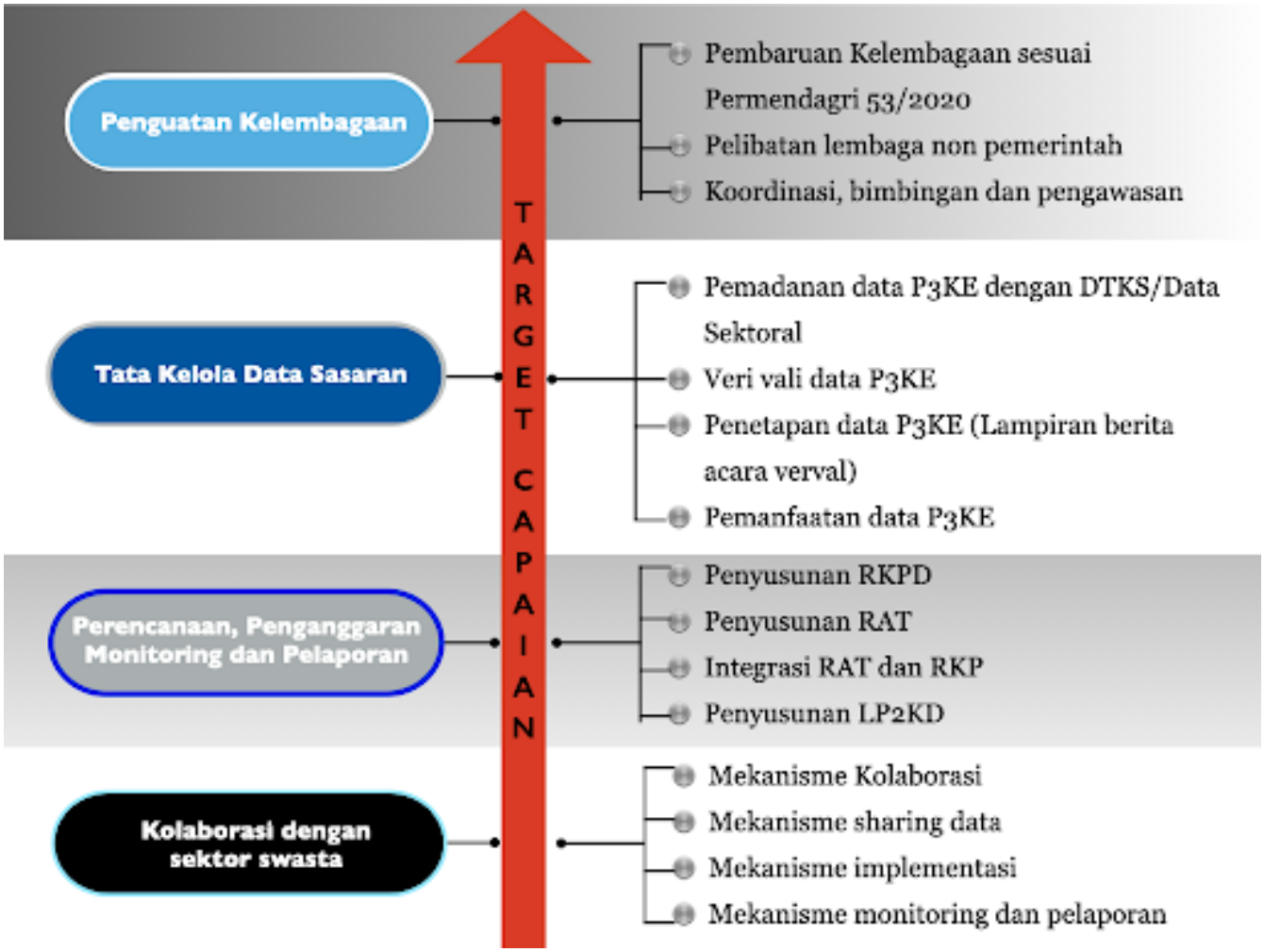
Terselenggaranya program ini menegaskan peluang bangkitnya kesejahteraan kelompok rentan khususnya aspek keadilan sosial pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar warga serta afirmatif negara terhadap kebutuhan tersebut. Perubahan sosial yang tampak disini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan medis sangat baik, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif multi aktor (pemerintah dan non pemerintah), termasuk kelompok rentan peserta vaksin yang memperlihatkan bahwa integrasi sosial dengan mengedepankan kultur kegotong-royongan masih mampu eksis sebagai solusi pengentasan eksklusi sosial.

Pembelajaran program vaksinasi yang inklusif adalah pentingnya ada kelonggaran waktu dalam penyelenggaraan vaksinasi untuk kelompok-kelompok khusus. Hal tersebut agar dapat meningkatkan jangkauan penerima vaksin yang terbatas dari sisi data dan edukasi pra vaksinasi. Selain itu, Sistem data pilah penyelenggaraan vaksinasi perlu perbaikan, akan diadvokasi bersama dengan adopsi kebijakan vaksinasi booster inklusif.

DARI KEMISKINAN EKSTREM MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemerintah Indonesia melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022: "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim" menargetkan Ketepatan Sasaran, Keterpaduan, dan Sinergi Multi Pihak, ditugaskan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan seluruh Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah juga menetapkan lokasi prioritas dan target penghapusan kemiskinan ekstrem dan data P3KE sebagai evidence based policy dan mengkoordinasikan partisipasi non pemerintah.

IDEA pada tahun 2022-2023 mengimplementasikan program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) untuk mendorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia di Provinsi Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Timur. Proses kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan kabupaten diawali dengan kegiatan Kick Off Meeting di masing-masing Provinsi dengan melibatkan 10 kabupaten yaitu, Banyuwangi, Blitar, Lamongan, Sidoarjo dan Sumenep di Jawa Timur, serta Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara dan Belu di Nusa Tenggara Timur.



Intervensi yang diberikan untuk mencapai target tersebut diawali dengan penilaian cepat (Rapid Assessment) terhadap situasi penanggulangan kemiskinan di masing-masing pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya gap di antara masing-masing daerah, mulai dari gap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) hingga tata kelola data dan perencanaan. Hasilnya untuk memperbaiki gap tersebut melalui penyusunan rencana kerja (workplaning) intervensi bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah.

Asistensi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah pelaksana utama (driver) penanggulangan kemiskinan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial. Berikut adalah rangkuman jumlah intervensi yang diberikan berdasarkan jenis intervensi. Tujuan intervensi:

- Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kualitas tata kelola data sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di daerah dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah Pusat, terutama kebijakan yang menempatkan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTT sebagai Wilayah Pilot Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Di Tingkat Provinsi, baik Provinsi Jatim dan Provinsi NTT merupakan dua provinsi pilot penanggulangan kemiskinan ekstrem. Regulasi penanggulangan kemiskinan provinsi, selain tertuang dalam regulasi pemerintah daerah mengenai RPJMD maupun perubahan RPJMD,

Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur NTT No.39 Tahun 2016 tentang Strategi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020. Merespon kebijakan pusat tentenga Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Inpres no 4/2022), saat ini Pemerintah Provinsi masih mempersiapkan regulasi terkait. Masing-masing provinsi memiliki strategi yang berbeda dalam menunjukkan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dalam penyusunan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, TKPK memasukkan prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sementara RPKD Provinsi NTT belum memiliki strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem. TKPK Provinsi Jawa Timur mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun RPKD dan menerbitkan SK TKPK Kabupaten/Kota. Dari 5 Kabupaten Wilayah Kerja USAID ERAT, hanya Kabupaten Sumenep yang belum memiliki RPKD. Sedangkan di Provinsi NTT, mayoritas masih dalam proses perencanaan penyusunan RPKD, kecuali Kabupaten Sumba Timur.

Komitmen Pemerintah terhadap Penanggulangan Kemiskinan tidak selalu diikuti dengan program-program inovasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem. JATIM SATYA (Jawa Timur Sejahtera dan Mulia) menjadi inti program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat

miskin. Bentuk programnya meliputi bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan individu, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan UM, serta program penanggulangan kemiskinan pro rakyat lain.

Provinsi Jawa Timur memiliki program penanggulangan kemiskinan andalan, salah satunya JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dan PKH Plus. Belakangan muncul program Dharma Bhakti Nagari untuk menggenjot menurunnya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Sementara Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan teori perubahan yang dibangun dari masalah kemiskinan konsumsi dan 10 bidang non konsumsi dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan ketahanan fisik SDM kelompok masyarakat miskin, penyediaan sarana dan prasarana permukiman layak, perlindungan dan pemberdayaan sosial dan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Di tingkat kabupaten/kota, komitmen pemerintah ditunjukkan secara beragam baik di wilayah Jawa Timur maupun NTT. Di Jawa Timur, dari 5 wilayah kabupaten intervensi kemiskinan ekstrem USAID-ERAT, hanya Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terkesan kurang responsif terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Lima kabupaten di Provinsi NTT secara terbuka menanggapi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan mempercepat perencanaan penyusunan dokumen RPKD dan mengaktifkan kelembagaan TKPK di tingkat kabupaten.

aik TKPK Provinsi Jawa Timur maupun TKPK Provinsi NTT memiliki kelembagaan TKPK dan didukung keberadaan sekretariat TKPK, meskipun tidak selalu diikuti dengan dukungan operasional yang cukup. Kedua provinsi memiliki SK TKPK yang diperbaharui secara periodik. TKPK Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang beranggotakan OPD, Perwakilan Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta. TKPK Provinsi NTT beranggotakan OPD sepenuhnya. Ada keraguan untuk melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam struktur TKPK. Di kedua provinsi memiliki sekretariat TKPK yang dilengkapi sumberdaya dan dukungan operasional yang minimal dalam mendinamisasi tim. Peningkatan kapasitas tim terkait peran dan fungsi belum menjadi agenda rutin TKPK. Rapat koordinasi menjadi ajang dalam memperbaharui informasi mengenai kebijakan terbaru di Jawa Timur terutama di lingkup OPD dan Pemerintah Kabupaten. 5 Kabupaten wilayah kerja USAID ERAT di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTT sudah memiliki SK TKPK, namun pada umumnya struktur belum berjalan. Atau kegiatan yang ada masih menjadi bagian dari Bappeda/Bapelitbangda di masing-masing wilayah.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim bervariasi di dua provinsi. Di Provinsi Jawa Timur, pemerintah memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program penanggulangan kemiskinan baik mengikuti program reguler OPD maupun anggaran program penanggulangan kemiskinan lain seperti JATIM PUSPA (Pemberdayaan ekonomi perempuan), Dharma Bhakti Nagari dsb. Selain itu juga alokasi anggaran untuk membangun sistem data



Bimtek dan Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggullangan Kemiskinan Daerah yang diikuti seluruh TKPK Kabupaten/Kota serta TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Doc IDEA

kemiskinan "SINTAGELIS". Jawa Timur juga memanfaatkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Di Provinsi NTT Alokasi anggaran kemiskinan mengikuti program masing-masing OPD yang sasarannya ditujukan kepada penduduk miskin.

Pengarusutamaan Gender Equality, Disability and Social Inclusion

Partisipasi Publik dan Inklusi Gender-Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan lebih kuat di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Provinsi NTT. Provinsi Jawa Timur selangkah lebih maju dalam melibatkan masyarakat sipil seperti unsur organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam struktur TKPK dan unsur sektor swasta seperti Bank Jatim, BPR Jatim dan Forum penyelenggara tanggungjawab sosial perusahaan. Sementara Provinsi NTT masih ragu-ragu untuk melibatkan unsur masyarakat sipil. Dalam hal inklusi gender-sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan analisis data DTKS tentang jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan, terutama dalam Desil 1,2,3 dan 4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membuat inovasi program andalan yang selaras dengan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang menyasar pada perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga melalui Jatim Puspa.

Sementara di Provinsi NTT, intervensi pemerintah daerah lebih fokus pada pemerataan pangan melalui program "Tanam Jagung Panen Sapi". Pelibatan masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan dilakukan pemerintah di dua provinsi dalam proses-proses perencanaan pembangunan, namun belum dilakukan dalam proses-proses perencanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Di Lima Kabupaten di Jawa Timur, hanya Kabupaten Banyuwangi yang memiliki rekam jejak partisipasi publik dan inklusi gender dalam proses perencanaan pembangunan dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya. Di 5 kabupaten di NTT, pada umumnya belum tampak hasilnya terutama karena TKPK tidak aktif dan proses penyusunan RPKD juga baru saja dimulai.

IMPLIKASI PROGRAM

Updating, verifikasi dan validasi data kemiskinan Provinsi Jawa Timur lebih tertata dengan aplikasi SINTAGELIS. Sedangkan Provinsi NTT tidak menggunakan aplikasi khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Program ERAT menghasilkan 4 capaian yaitu, pertama: kedua provinsi telah menggunakan sumber data P3KE untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu, menguatnya Tata kelola Data Sasaran yang ditandai dengan peningkatan kualitas data sasaran di daerah dengan mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan pemadanan data P3KE dengan DTKS atau data sektoral, Verval data P3KE, Penetapan data P3KE beserta lampiran berita acara verval dan pemanfaatan data P3KE. Perubahan kualitas data sasaran terjadi di 10 kabupaten yang ditandai dengan turunnya angka inclusion error dengan penurunan jumlah aggregate data seperti NIK ganda, penerima bantuan ganda, keluarga dengan status TNI POLRI dan ASN, dan keluarga tanpa NIK.

Kedua, Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur juga sudah memiliki dokumen RAT tahun 2022 (Jawa Timur) dan RAT tahun 2023 (Jawa Timur dan NTT) dan dokumen LP2KD tahun 2021 untuk masing-masing provinsi. Sementara di tingkat kabupaten, masih sebagian kecil kabupaten yang sudah memiliki RPKD, terutama di Provinsi NTT dari 5 kabupaten, hanya Kabupaten Sumba Timur yang sudah memiliki RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

Ketiga, Upaya asistensi teknis, memberikan dampak terhadap menguatnya peran TKPK Provinsi dan Kabupaten dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang ditandai dengan: 1) Penguatan kapasitas dan aktivasi kelembagaan TKPK di tingkat provinsi dan kabupaten; 2) Menyediakan sumberdaya perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan selama ini, terutama untuk mengetahui efektivitas serta level dampak yang bisa dicapai atas pelaksanaan program-program tersebut.

Hasil evaluasi tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail kepada TKPK model program seperti apa yang sebaiknya dijalankan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, kedepan, hasil evaluasi ini akan menjadi input perencanaan yang lebih baik. 3) Pendampingan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten untuk berkoordinasi dan diskusi serial dengan sektor swasta dalam rangka mencapai sinergitas intervensi program penanggulangan kemiskinan. Sebab, di Jawa Timur sudah terdapat forum CSR yang sudah berjalan sejak 2016. 4) Dukungan kepada TKPK Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan overlay dan analisis data kemiskinan dari berbagai sumber untuk mereview skala prioritas program dan focus wilayah intervensi, serta inovasi strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem..



Forum Pembelajaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya. Doc IDEA

Keempat, program juga berhasil meningkatkan tata kelola perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kolaborasi dengan sektor swasta. Upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran. Sementara untuk kolaborasi dengan sektor swasta, USAID ERAT memberikan asistensi melalui workshopkepada TKPK Provinsi dan Sektor Swasta dalam membangun kerjasama kolaborasi melalui pemanfaatan data sasaran dan konvergensi program antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi dan berkoordinasi intensif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelembagaan TKPK di daerah berjalan lebih dinamis dan intens melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Beberapa kabupaten mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

AGENDA PRIORITAS 2

MENDORONG PENINGKATAN KESADARAN PUBLIK DAN KHUSUSNYA WARGA TERPINGGIRKAN MENGENAI TRANSPARANSI KEBIJAKAN DAN ALOKASI ANGGARAN SERTA KETERSEDIAAN AKSES INFORMASI YANG MEMADAI.

MEMPERKUAT SOLUSI LOKAL UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA: BERGERAK DAN MENYEBARKAN CERITA YANG BERDAMPAK

IDEA didukung oleh USAID-MADANI melalui program "Bantuan Teknis Solusi Lokal Transparansi Dana Desa" memberikan asistensi kepada tujuh Lead Partner (LP) di wilayah Kabupaten dan Kota, yang fokus programnya pada isu peningkatan pengelolaan dana desa. Ketujuh mitra tersebut ialah: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Serang (Banten), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kompip Kota Surakarta (Jawa Tengah), Yayasan Bambu Nusantara Kota Madiun dan Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Perkumpulan Wallacea Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Gapemasda Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat)

Rangkaian kegiatan asistensi teknis bersama LP serta melibatkan FC (Field Coordinator) dan LF (Local Facilitator), antara lain: Capacity need assessment training dengan Materi training yang diberikan tentang knowledge management, pengarusutamaan GEDSI untuk pembangunan desa, transparansi dana desa, hal warga dan kewajiban negara, advokasi kebijakan dan pengembangan BUMDesa dan asistensi teknis. Asistensi teknis yang diberikan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan teknis bagi mitra utama MADANI serta anggota forum pembelajaran

IMPLIKASI PROGRAM

Capaian program asistensi teknis kepada 7 lead partner adalah memperkuat solusi lokal di 2 aspek, yaitu pemetaan kebutuhan memperkuat internal organisasi terutama di aspek knowledge management dan penguatan gerakan advokasi. Solusi lokal yang sudah dirumuskan adalah keterlibatan kelompok rentan untuk mewujudkan desa inklusi yang ramah terhadap perempuan dan anak, mewujudkan BUM Desa yang inklusif, alokasi anggaran desa atau kelurahan yang memiliki prioritas terhadap kelompok rentan. Pendampingan pengorganisasian warga dan advokasi kebijakan, dapat memantik kelompok dampingan (learning forum) memiliki kesadaran dan kemauan terlibat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan monitoring pembangunan.

Penguatan knowledge management menjadikan kapasitas lead partner menjadi meningkat dengan pengembangan penataan sistem data dan informasi di internal organisasi agar data dan informasi dapat dimanfaatkan untuk penggalangan sumber daya maupun memperkuat kerja-kerja advokasi dan reputasi serta kredibilitas organisasi.

Program asistensi teknis menghasilkan dokumentasi 13 cerita praktik baik dari 7 CSO yaitu: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Serang (Banten), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kompip Kota Surakarta (Jawa Tengah), Yayasan Bambu Nusantara Kota Madiun dan Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Perkumpulan Wallacea Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Gapemasda Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat).

Kota Madiun menekankan pentingnya Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Di Kota Madiun Yang Inklusif dan pentingnya Kolaborasi Pemerintah Dengan Forpemma Dalam Memperkuat Kelurahan Mandiri Berkelanjutan. Kota Surakarta menghasilkan cerita praktik baik: Mengubah "Noice" Menjadi "Voice": Geliat Kelompok Pekka Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Kelurahan Mojosongo . Sementara itu, Kabupaten Sumenep fokus kepada Jasa Dan Usaha Yang Diidentifikasi Secara Partisipatif Berbasis Masyarakat dan bagaimana Mengelola Bumdesa Yang Berbasis Masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara berhasil mengadvokasi Komitmen Pemerintah Desa Pincara Mendorong Pelibatan Kelompok Rentan Dalam Proses Pembangunan Desa Yang Inklusi. Kabupaten Sambas menekankan pentingnya Musyawarah Khusus Perempuan Untuk Anggaran Desa Yang Inklusif dan Kadin (Kampung Edukasi, dan Literasi Anggaran Dana Desa Inklusif) Sebagai Motor Penggerak Menuju Dana Desa Yang Inklusif. Sedangkan Kabupaten Sumedang berhasil menguatkan Jaring Aspirasi Kader Pintar Untuk Perencanaan Desa Yang Lebih Partisipatif dan Menembus Batas Dominasi Laki-Laki Di Organisasi Kader Pintar Desa Kadakajaya. Replikasi Madrasah Anggaran Kader Pintar Untuk Desa Ciherang Menuju Perempuan Lebih Berdaya.

Kabupaten Serang mendokumentasikan praktik baik Kerjasama Kolaborasi Menciptakan Kepercayaan Pemda Terhadap Oms dan Mawar Desa Berkontribusi Dalam Membangun Domas Yang Sejahtera. Adanya peningkatan kapasitas MAWAR DESA untuk CSC (Community Score Card) guna menilai pelayanan pemerintah desa. Meningkatnya kapasitas mawar desa tidak lepas dari perjuangan anggota mawar desa yang konsisten mengikuti workshop peningkatan kapasitas yang diberikan oleh LP, DSP, PSP dan LF dari mulai apa itu CSC, alat atau tools yang digunakan untuk menilai suatu pelayanan pemdes dan bagaimana cara menilai menggunakan alat atau tools tersebut. Mawar Desa Juga mampu mengadvokasi kebijakan perdes pengelolaan sampah dan DERAP serta dapat mempengaruhi anggaran desa. Learning Forum (SMS) termotivasi untuk mendapatkan Swakelola tipe tiga. Mendengar PDA Kab. Serang mendapat swakelola tipe tiga, OMS di Kab. Serang khususnya learning forum terdorong untuk melakukan dan meningkatkan kapasitasnya sehingga dapat bekerjasama dengan pemda melalui skema swakelola tipe 3.



Workshop Formulasi Pendampingan Teknis Solusi Lokal kepada mitra Utama Madani hari pertama di Yogyakarta (24/05). Peserta yang terlibat dalam workshop tersebut ialah perwakilan dari 7 Mitra program Madani dari Kota Surakarta, Madiun, Kabupaten Sumenep, Sambas, Luwu Utara dan Sumedang. Doc. IDEA

ADVOKASI ANGGARAN WARGA UNTUK AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG INKLUSIF

Program advokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk perbaikan kualitas perencanaan penganggaran daerah.Adapun implementasi program ini dilaksanakan dengan strategi pendampingan dan asistensi teknis utamanya kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kalurahan, serta pendampingan dan advokasi kepada warga miskin dan kelompok rentan.

Dengan terselenggaranya program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis program/kegiatan yang masuk kategori pro poor maupun pro gender pada RKPD atau usulan perubahan program/kegiatan dalam rancangan RKPD.



Asistensi monitoring program penanggulangan kemiskinan kepada kelompok perempuan di Kalurahan Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, DIY.

IMPLIKASI PROGRAM

Program ini dapat meningkatkan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah tentang anggaran pro poor dan pro gender, sekaligus pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Disamping itu mereka juga mampu memanfaatkan data kemiskinan yang diperoleh melalui forum Musrenbang. Sebagai contoh, di Padukuhan Kroco, kalurahan Sendangsari Kabupaten Kulon Progo, kelompok mengangkat persoalan stunting sebagai prioritas yang perlu segera diselesaikan.

Warga juga memiliki dalam keterampilan dalam menganalisis anggaran daerah dan anggaran desa serta terlibat dalam proses perencanaan anggaran dengan menggunakandata kemiskinan yang sudah diverifikasi dan validasi. Catatan penting dalam proses advokasi adalah: 1). Satu data kemiskinan menjadi penting sebagai pijakan aksi penanggulangan kemiskinan, 2). Masyarakat sebagai aktor utama maka perlu diberikan ruang kontribusi, 3). Intervensi penanggulangan kemiskinan pada data mikro, dan 4). Pelibatan masyarakat dalam aktivitas kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan. Program ini berimplikasi pada keadilan ekonomi bagi kelompok rentan. Validitas data kemiskinan menjamin kelompok rentan dalam mengakses berbagai program pengentasan kemiskinan pemerintah, dimana peluang tersebut menjadi jaminan akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi. Perubahan sosial yang tampak pada pemutakhiran data kemiskinan mengindikasikan kemauan perilaku inovatif dari para pemangku kebijakan untuk memampukan warganya yang tereksklusi.



Sanggar Sendratari dari Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo usai tampil dalam Forum Pembelajaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY bertajuk "Greget Desa" yang diselenggarakan IDEA.

PELIBATAN KOMUNITAS DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN MELALUI IMPLEMENTASI EITI DI INDONESIA

Sejak tahun 2010 Indonesia telah mengadopsi standar global atas pelaksanaan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau yang dikenal dengan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). Pelaksanaan inisiatif ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan adanya inisiatif EITI adalah untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Transisi energi merupakan pergeseran sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke energi bersih yang lebih ramah di lingkungan. Tujuan dari peralihan ini adalah untuk menekan risiko pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan di masa mendatang. Isu transisi energi tengah ramai digaungkan di tingkat global dan nasional bahkan menjadi prioritas isu yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia.

Transisi energi diharapkan membentuk masa depan negara-negara yang bergantung pada sumber daya, yang berdampak pada pendapatan pemerintah, keputusan investasi, dan pembangunan di tingkat lokal. Sementara beberapa daerah mungkin mendapat manfaat dari peningkatan investasi mineral strategis, yang lain mungkin menghadapi kerugian ekonomi di mana ada transisi dari produksi bahan bakar fosil. Transisi ke ekonomi rendah karbon akan berimplikasi pada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi, serta pasokan mineral strategis, kunci dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan baterai listrik. Bagi masyarakat yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, transisi energi akan berdampak pada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif, kesempatan kerja dan pengadaan lokal, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.

Belum lagi, persoalan dampak yang kian meluas hingga merugikan masyarakat khususnya penduduk yang tinggal berdekatan dengan wilayah operasi industri tersebut. Ragam implikasi dari pelaksanaan industri fosil sudah seharusnya menjadi pembelajaran dalam tata kelola energi di masa transisi. Untuk itu, diperlukan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat dalam mengawasi proses transisi dapat berjalan dengan baik dan minim risiko.

Indonesia sebetulnya sudah melakukan diversifikasi energi dengan

mengkombinasikan energi fosil dan energi bersih. Meskipun, dominasi supply energi fosil masih tinggi, namun pemerintah sudah mulai menaruh perhatian terhadap energi yang lebih ramah lingkungan. Selain energi terbarukan seperti air, surya, angin, pemerintah tengah mengembangkan energi listrik berbasis baterai. Dimana dalam pembuatannya membutuhkan nikel sebagai komponen pembentukannya. Kini Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri baterai di Morowali, Sulawesi Tengah yang sekaligus merupakan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, tata kelola transisi energi perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka mempersiapkan proses peralihan energi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perluasan informasi, peningkatan kapasitas, maupun akses informasi terkait perlu ditingkatkan. Diharapkan ragam pemangku kepentingan dapat mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga akan lebih mampu menekan risiko dari transisi khususnya di tingkat lokal.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mengawal transisi energi berkeadilan di Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan IDEA Yogyakarta atas dukungan Sekretariat EITI Internasional menjalankan program "*Engaging Communities in a Just Transition through EITI Implementation*". Program ini untuk mendukung masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk lebih memahami, membahas, menangani, dan mempersiapkan dampak transisi energi di komunitas yang bergantung pada industri ekstraktif di daerah yang bergantung pada sumber daya. Program ini melakukan serangkaian diskusi, pelatihan dan pendampingan yang melibatkan langsung masyarakat desa Tiu, Maralee, Bungintimbe, Molores, dan Towara yang menghasilkan beberapa langkah strategis untuk advokasi.

Tujuan dari program ini adalah:
1. Memperkuat pengetahuan, kapasitas, dan kesadaran CSO terhadap dampak transisi energi dan industri ekstraktif serta pentingnya transisi energi berkeadilan di tingkat daerah.
2. Diseminasi dan tindak lanjut kajian "Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara".
3. Memperkuat strategi jejaring CSO untuk merumuskan solusi bersama dalam memperbaiki tata kelola SDA dan mewujudkan transisi energi yang adil khususnya bagi masyarakat.
4. Merumuskan strategi advokasi pelembagaan EITI di daerah

IMPLIKASI PROGRAM

Isu Gender, pada sektor industri ekstraktif, khususnya industri penambangan Nikel dan pengolahan Nikel di Kabupaten Morowali Utara, perempuan lebih cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi informal seperti menjual makanan dan minuman untuk pekerja. Di Morowali Utara, kurang dari 6% anggota masyarakat yang bekerja di tambang nikel lokal adalah perempuan. Sifat informal perempuan tidak dipertimbangkan dalam rencana transisi energi, oleh karena itu data gender perlu *disclosure* data pilah gender (perempuan di sektor tenaga kerja industri ekstraktif baik formal maupun informal) untuk memitigasi dampak transisi energi bagi perempuan.

Pelibatan komunitas sekitar tambang, Pemangku kepentingan

menekankan perlunya informasi tentang persyaratan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan persyaratan implementasi oleh perusahaan energi terbarukan, serta berwawasan ke depan terkait informasi rencana pengembangan proyek. Pemangku kepentingan menginginkan akses terhadap data lingkungan hidup memantau dampak operasi penambangan.

Akses dan informasi, terkait konsep transisi energi dan dampaknya, masyarakat di desa-desa tersebut hanya memahami bahwa maraknya eksploitasi pertambangan nikel dan tumbuhnya industri smelter di Morowali Utara, digunakan untuk bahan baku produk baterai. Masyarakat sekitar tambang belum banyak mengetahui berbagai regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan sejak masa pra-tambang, pada saat aktivitas penambangan, dan pascatambang. Di sekitar lokasi penambangan belum terdapat informasi mengenai jenis bahan galian yang ditambang, luas wilayah penambangan, serta kapasitas atau volume bahan galian yang ditambang. Masyarakat belum banyak mengetahui potensi pertambangan dan energi terbarukan di wilayahnya.

Terkait informasi anggaran, baik peraturan terkait anggaran, mekanisme dan proses penganggaran, serta dokumen anggaran, belum banyak yang diketahui masyarakat. Masyarakat tidak tahu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan .Providing detailed and timely information Memaksimalkan EITI sebagai platform transparansi dan akuntabilitas. .Transisi energi diperkirakan akan mengubah masa depan negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam, sehingga b.erdampak pada penerimaan negara, keputusan investasi, dan pembangunan di tingkat lokal. Meskipun beberapa wilayah dan daerah mungkin mendapat manfaat dari peningkatan investasi pada mineral strategis, wilayah lain mungkin menghadapi kerugian ekonomi ketika beralih dari produksi bahan bakar fosil. Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan berdampak pada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan pasokan mineral strategis yang sangat penting dalam meningkatkan energi terbarukan. Bagi masyarakat yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, transisi energi akan berdampak pada penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif, lapangan kerja dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.

Pemanfaatan dan informasi bagi masyarakat, berdasarkan diskusi dengan masyarakat mengenai cara meningkatkan transparansi dan tata kelola kegiatan pertambangan, masyarakat menyepakati beberapa hal berikut:

- Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan mengenai aturan-aturan yang mendasari kegiatan pertambangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- Masyarakat berharap beberapa peraturan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

- Perlu ada penjelasan mengenai keterkaitan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara untuk Desa.
- Perlunya informasi terkait izin untuk kejelasan/dan batas wilayah pertambangan
- Perlu adanya kejelasan mengenai izin lingkungan dan apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta bagaimana pelaksanaannya, khususnya dalam pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
- Perlu adanya kejelasan dan transparansi mengenai tanggung jawab dan kewajiban sosial perusahaan serta program CSR kepada masyarakat agar tidak membingungkan dan menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.
- Pemerintah Desa Tiu dan Maralee saat ini telah memiliki website desa yang diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dan informasi bagi warga. Diharapkan website dapat berfungsi dengan data terkait di atas serta melalui website Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten.

Pentingnya membangun EITI di tingkat lokal, tidak ada satu pun masyarakat di desa-desa tersebut yang mengetahui tentang inisiatif EITI dan data serta informasi apa saja yang dihasilkan oleh EITI. Meski masyarakat di tingkat komunitas belum mengetahui tentang EITI, namun setelah mendapat penjelasan dari tim pelaksana Program, masyarakat terlihat sangat antusias mendukungnya. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi agar permasalahan dampak pertambangan yang saat ini mengancam ekosistem Danau Tiu yang menjadi sumber air, penghidupan dan penghidupan/pangan masyarakat dapat diselesaikan, terutama melalui mediasi melalui forum multipihak.

Program ini memiliki beberapa rencana tindak lanjut dan komitmen yang disepakati oleh para peserta, baik dari masyarakat, CSO, dan pemerintah daerah, beberapa peluang, seperti: Antusiasme yang tinggi untuk membentuk EITI di tingkat Lokal, khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Inisiatif EITI diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan terkait berbagai permasalahan.

Dari sejumlah CSO di Sulawesi Tengah, berkomitmen untuk memperkuat jaringan untuk mengawal transisi energi, termasuk perlunya memperluas sosialisasi laporan EITI ke daerah-daerah, termasuk daerah sekitar tambang atau proyek energi terbarukan. Dari hasil pelatihan yang diikuti sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah, peserta menyampaikan akan mendiskusikannya dengan Pimpinan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membahas pembentukan EITI Lokal di Sulteng.

Beberapa peluang keterlibatan yang ada di tingkat lokal dapat digunakan untuk memperluas data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti: Memanfaatkan pertemuan masyarakat untuk dialog dan sosialisasi serta meningkatkan partisipasi aktif warga melalui pertemuan masyarakat

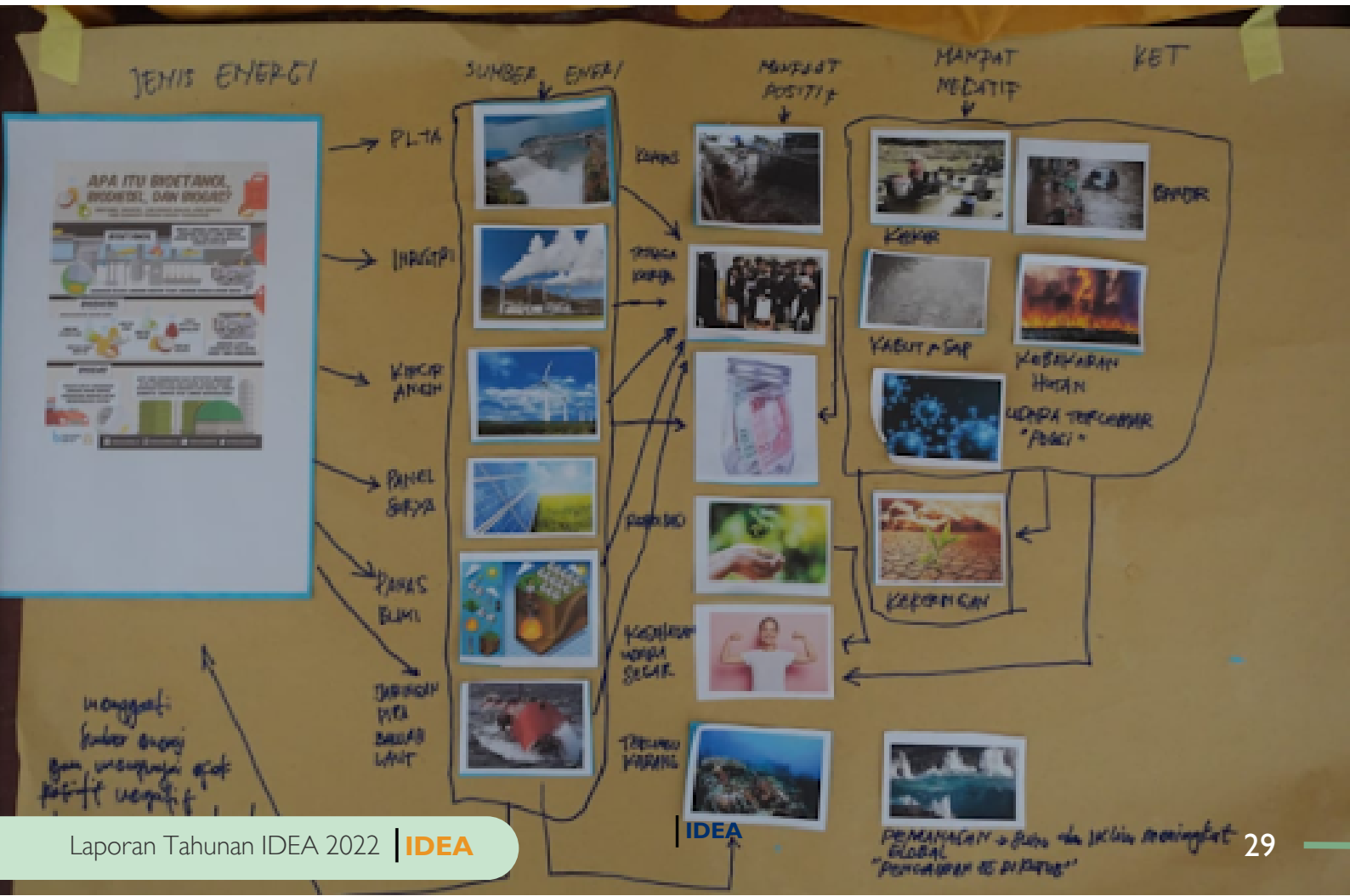
(pertemuan kelompok perempuan, kelompok pemuda desa, pertemuan dusun, pertemuan kelompok tani). Perlu memaksimalkan forum proses perencanaan desa dengan diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (isu tematik).

Program ini juga memberikan beberapa rekomendasi:

- Bagi Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai leading sector EITI Indonesia
- Perlunya sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, sehingga daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pertambangan.

Sektor ini, terutama terkait dengan kebijakan terkait.

- Perlu dilakukan intensifikasi promosi terkait inisiatif EITI di tingkat daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa agar masyarakat dapat turut serta mendorong implementasi seluruh rantai nilai EITI di tingkat daerah dan komunitas.
- Kementerian ESDM perlu mendorong dashboard fasilitas transparansi dan akuntabilitas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Kementerian ESDM perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam mengatasi dampak pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak lebih lanjut terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.



Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Morowali Utara)

- Pemerintah daerah harus mendukung pelembagaan EITI di Morowali Utara dalam proses persiapan transisi energi di tingkat daerah. Misalnya ketersediaan portal data sesuai rantai nilai industri ekstraktif, penyediaan informasi dana pertambangan, volume produksi, dan harga jual nikel, kobalt dan panas bumi, IUP, dana program CSR, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, dampak lingkungan, analisis dampak.
- Perlu lebih sering diadakannya forum multipihak di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti;
- ombudsman lokal, komite transparansi lokal, jurnalis dan NGO lokal.

Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah)

- Edukasi Energi Terbarukan bagi masyarakat sekitar Industri Pertambangan.
- Terdapat peta kebutuhan listrik on dan off grid di wilayah sekitar tambang
- Rencana pembangunan energi terbarukan untuk masyarakat (kerjasama dengan program CSR perusahaan).
- Mendorong prioritas pembangunan pembangkit listrik terbarukan untuk masyarakat (bukan perusahaan).
- Menyediakan data portal dan sosialisasi platform EITI dan laporan EITI di tingkat
- lokal.
- Memberikan hasil pemantauan dampak lingkungan secara berkala.
- Pemantauan cara mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang telah dilakukan.
- Contoh: stunting, krisis air bersih, ketahanan pangan.

Untuk CSO Lokal

- Partisipasi aktif melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun, untuk diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (masalah tematik)) dengan pemerintah daerah dan perusahaan.

Untuk perusahaan pertambangan dan smelter

- Dialog intensif dengan masyarakat sekitar industri pertambangan.
- Bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari pertambangan.
- Pengungkapan program dan alokasi anggaran CSR untuk masyarakat.

Program juga merekomendasikan perlu memberikan dukungan kepada MSG EITI Indonesia dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal, peluang dan kemungkinan risiko seputar transisi energi melalui transparansi data dan informasi di tingkat sub-nasional berdasarkan studi kasus masyarakat di Kabupaten Morowali utara dan dukungan kepada komunitas lokal melalui peluang untuk melibatkan platform MSG EITI Indonesia untuk memperkuat suara komunitas demi perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam.

Sejumlah Isu penting juga perlu diadvokasi yaitu: mendorong perusahaan menerapkan good mining practices, mengembangkan kawasan lingkungan lestari, data pilah tenaga kerja perempuan yang bekerja di industri Nikel, perlindungan hak-hak pekerja perempuan (hak kesehatan, hak ketenagakerjaan, hak keselamatan kerja, dll) serta pengembangan peluang livelihood di sektor non pertambangan, terutama di sektor energi.

AGENDA PRIORITAS 3

MEMBANGUN WARGA SEBAGAI KOMUNITAS CERDAS YANG MEMAHAMI LOGIKA ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK, AKTIF TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN DAN AKTIF MENGAKSES INFORMASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK TERMASUK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DARING.

PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK MENDUKUNG DESA MANDIRI BUDAYA

Dalam upaya penguatan sekaligus percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan desa, IDEA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Pemda DIY melakukan pendampingan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 10 desa mandiri budaya DIY yaitu:

- Kabupaten Bantul: kalurahan Sabbodadi, Bangunjiwo, Timbulharjo
- Kabupaten Gunungkidul: kalurahan Giring, Bejiharjo
- Kabupaten Kulon Progo: Glagah, Tuksono, Hargomulyo, Banjarharjo, Tanjungharjo

Implementasi program diawali dengan kegiatan training untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman aktor-aktor kunci Pemerintah Desa dalam kaitan implementasi PUG maupun PPRG dengan menggunakan instrumen analisis gender akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Selain itu, data pembuka wawasan juga menjadi materi dalam pelatihan maupun pendampingan dan coaching clinic. Selanjutnya dilakukan telaah perencanaan dan penganggaran kalurahan untuk mengidentifikasi kapasitas anggaran responsif gender pada setiap kalurahan. Pada tahapan terakhir dilakukan coaching clinic kepada aktor-aktor kunci, diantaranya: Lurah, Carik, Kamituwa, Pangripta, hingga Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Desa Mandiri Budaya diatur dalam Pergub DIY nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah Desa/Kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan.

masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an. Dalam pasal 3 Peraturan Gubernur DIY nomor 93 tahun 2020 bahwa Desa Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. IDEA terlibat dalam sinergi dan harmonisasi program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya yang responsif gender.

IMPLIKASI PROGRAM

Kegiatan pendampingan PPRG menghasilkan program-program, kegiatan dan anggaran di kalurahan yang responsif gender untuk tahun anggaran 2023. tentang PUG dan Rencana Aksi Kalurahan terkait pelaksanaan PUG-PPRG. Setiap kalurahan program kegiatan diarahkan diarahkan untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di kalurahan dan program yang spesifik gender untuk kelompok rentan (perempuan kepala keluarga difabel, anak, lansia, warga miskin).

Pasca implementasi proses pendampingan kebermanfaatan utamanya diharapkan dapat diterima oleh aktor-aktor kunci kalurahan. Penguatan komitmen mereka dalam mengakomodasi PPRG dengan pengalokasian anggaran menjadi arah perubahan program pendampingan ini. Di dalam aspek kesejahteraan, program pendampingan ini berimplikasi pada terakomodasinya keadilan sosial khususnya tindakan afirmatif penyelenggara negara dalam memberikan jaminan hak dasar bagi kelompok rentan.



MENUJU SP4N LAPOR! YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengembangkan strategi nasional yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya penyediaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem SP4N-LAPOR!. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, KemenPAN-RAB telah menyusun Roadmap SP4N- LAPOR! yang menjadi landasan hukum pelaksanaan SP4N-LAPOR! oleh pemerintah daerah dan pedoman bagi pejabat daerah untuk menyusun prioritas kebijakan dan anggaran daerah dalam pelaksanaan SP4N-LAPOR!, termasuk bagaimana mengimplementasikan gender dan inklusi sosial di dalamnya, sehingga layanan aduan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas tanpa terkecuali.

Namun demikian, Laporan Survei Kepuasan Publik Tahun 2020 yang dilakukan oleh UNDP mengidentifikasi hanya 1,5 persen dari total responden adalah penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam penggunaan SP4N-LAPOR!. KemenPANRB bersama dengan UNDP telah melakukan kegiatan *Online Focus Group Discussion* (FGD) Bersama dengan Pemerintah Daerah Menuju SP4N-LAPOR! yang Inklusif bagi Disabilitas pada 26 Oktober 2021. Kegiatan ini melibatkan organisasi penyandang disabilitas nasional dan lokal, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, sejumlah rekomendasi pada aspek kebijakan, aksesibilitas dan partisipasi, sumber daya manusia, dan sistem telah dirumuskan bersama. Berikut ini rumusan rekomendasinya

1.Partisipasi

Tantangan dalam partisipasi adalah informasi mengenai SP4N-LAPOR! yang belum diketahui oleh mayoritas penyandang disabilitas. Disamping itu rendahnya kepercayaan terhadap layanan aduan SP4N-LAPOR! juga menjadi tantangan tersendiri. Kelompok penyandang disabilitas merasa ragu dan takut apabila aduannya tidak mendapatkan respon dari pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas atas SP4N-LAPOR!, Pemerintah pusat dan daerah diharapkan peningkatan cakupan sosialisasi kepada kelompok difabelnya, keluarganya dan sekolah-sekolah termasuk Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggandeng *influencer* dari masing-masing ragam disabilitas.

Pada saat yang sama, pemerintah juga wajib memperluas jejaring dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil lainnya dan organisasi massa untuk proses sosialisasi, pendampingan dan edukasi. Apalagi KemenPAN-RB telah menyiapkan pedoman sosialisasi SP4N-LAPOR! termasuk untuk penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas

Kelompok penyandang disabilitas mengalami tantangan untuk mengakses layanan aduan SP4N LAPOR!, terutama untuk tuna netra dan tuna rungu. Sistem website dan aplikasi SP4N LAPOR! belum menyediakan layanan pengaduan dengan kategori difabel dan ragamnya. Website dan aplikasi hanya menggunakan bahasa tulisan untuk informasi dan laporan. Sistemnya juga belum mampu mengidentifikasi pelapor yang difabel.

Prakteknya, selama ini kelompok difabel menyampaikan aduan secara langsung kepada organ pemerintah daerah penyedia layanan atau melalui orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah wajib melibatkan kelompok difabel dengan ragam disabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan sistem. Disamping itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan layanan aduan secara konvensional atau tatap muka langsung ke unit layanan dengan memastikan infrastruktur (sarana dan prasarana) tersedia bagi ragam disabilitas.

3. Sistem

Untuk memperluas aksesibilitas dan memperluas partisipasi penyandang disabilitas, website dan aplikasi SP4N-LAPOR! harus sesuai dengan ragam disabilitas sebagai berikut;

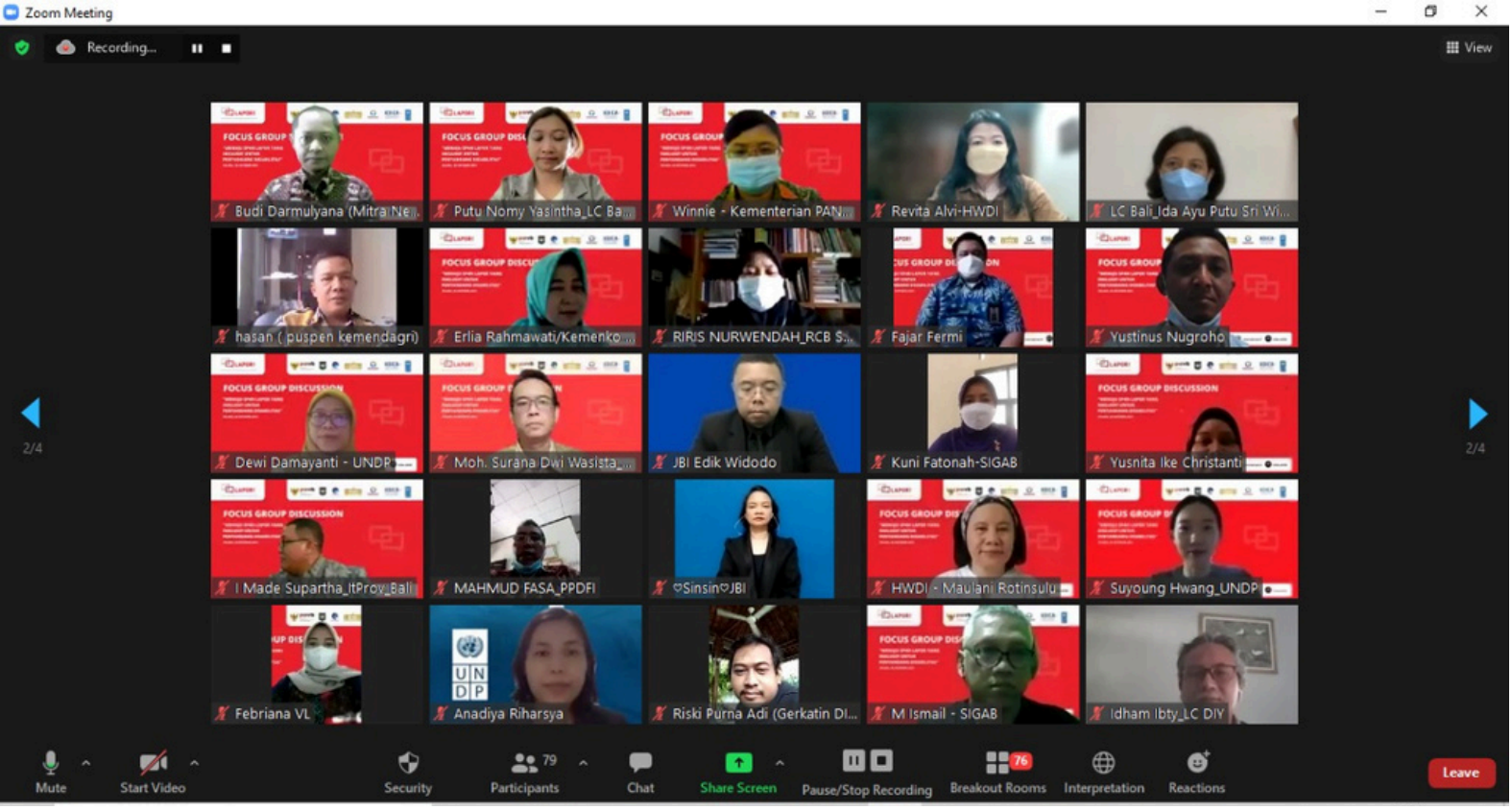
Kategori Difabel	Peningkatan Kualitas Fitur SP4N LAPOR!
Daksa	Bahasa yang sederhana dan mudah diingat
Rungu	• Bahasa yang sederhana dan mudah diingat • Konten dengan gambar dan teks
Netra	• Bahasa yang sederhana dan mudah diingat • *low vision mode* • *voice dan keyboard compatibility*

Selain itu, sistem juga wajib memuat tata kelola data aduan bagi disabilitas yang didalamnya memuat klasifikasi pelaporan bagi disabilitas dan ragam disabilitasnya, ragam informasi dan aduan yang dapat disampaikan serta durasi penanganannya. Untuk itu, perlu adanya SOP bagi pengelola SP4N-LAPOR! dan panduan penggunaan SP4N LAPOR! khusus disabilitas berdasarkan ragam disabilitas yang dapat digunakan oleh pengelola dan penyandang disabilitas.

4. Kebijakan

Pada level makro, pembangunan Komite Kerja Nasional beserta mekanisme kerjanya, wajib melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) dengan memberikan informasi tembusan dari 5 Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SP4N LAPOR!, sehingga Kemenko PMK dapat melakukan koordinasi horisontal dan vertikal. Selanjutnya Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional SP4N LAPOR! dengan menyusun dengan Rencana Aksi Daerah SP4N LAPOR! sebagai panduan pelaksanaan SP4N LAPOR! di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan untuk memayungi percepatan penggunaan SP4N LAPOR! sebagai kebijakan dan inovasi pelayanan publik berbasis pengaduan *(complaint-based public services policy)*.

Di level meso, perlunya penguatan kebijakan SP4N LAPOR! yang inklusif dan akuntabel, berupa panduan implementasi layanan pengaduan publik dan protap konsultasi publik difabel. Dan di level mikro, personil pengelola SP4N-LAPOR! di instansi ikut dalam proses peningkatan kompetensi, termasuk berpartisipasi aktif dalam



Focus Group Discussion (FGD) Menuju SPAN Lapor Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan IDEA bersama UNDP. | Doc IDEA

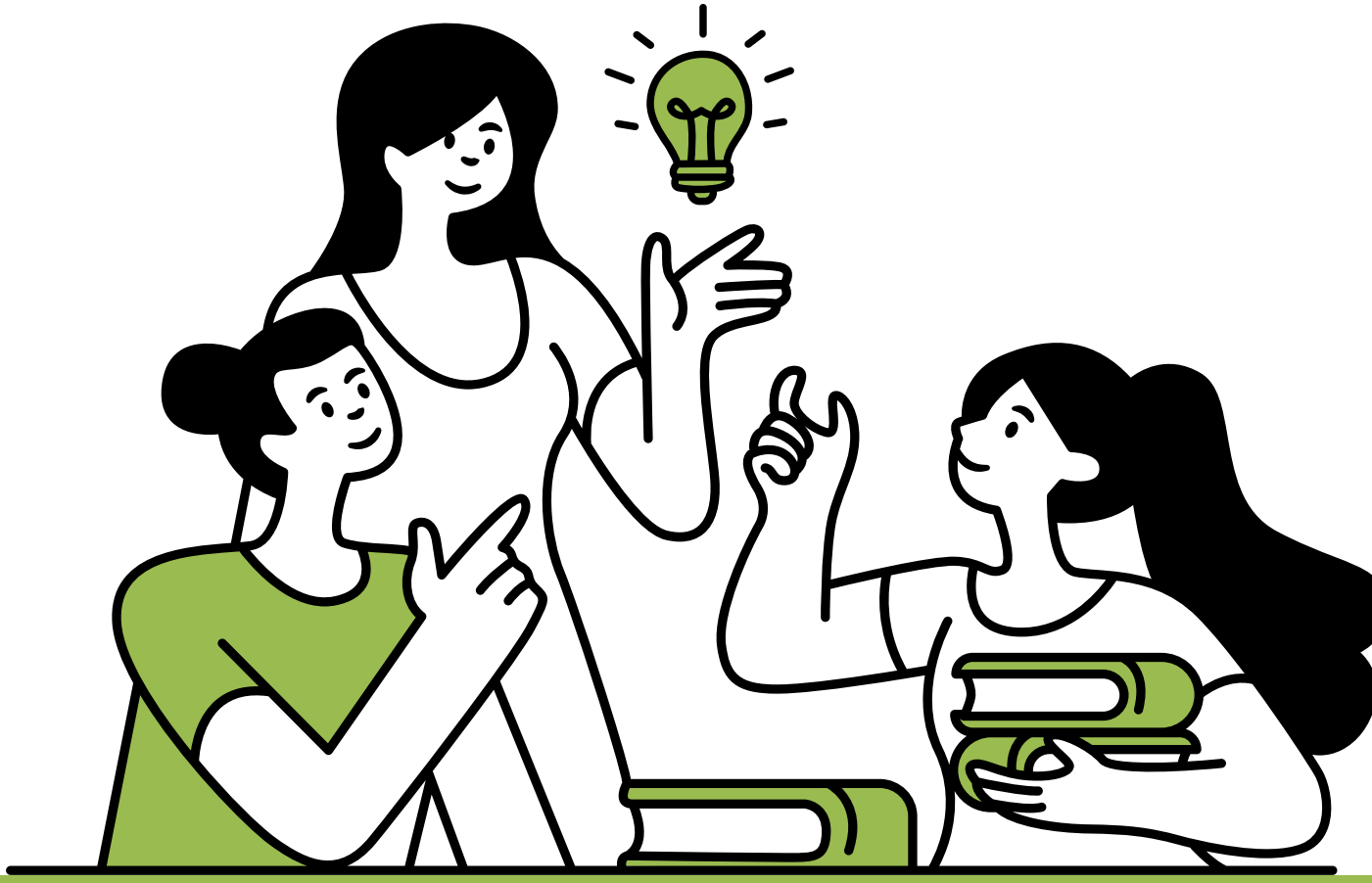
platform pembelajaran SP4N untuk pengembangan konten; e-learning; coaching dan mentoring; community of practices. Untuk pembangunan fungsi pengelolaan pengaduan secara khusus dalam organisasi dan tata kerja instansi wajib didukung oleh anggaran untuk sumber daya manusia; untuk itu perlu regulasi mengenai hal tersebut. Dan pada level ini, pemantauan dan evaluasi pengelolaan SP4N di lingkungan instansi wajib dilakukan secara periodik paruh waktu dan tahunan sesuai untuk mendorong rekomendasi dan review survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia

Untuk menampung aduan kelompok difabel dibutuhkan kapasitas SDM pengelola layanan aduan yang memiliki kapasitas melayani difabel di level kecamatan, kabupaten dan provinsi. Kebutuhan ini potensial diberikan kepada penyandang disabilitas.

Secara umum, tantangan dan peluang serta rekomendasi untuk peningkatan inklusifitas SP4N-LAPOR! sudah dapat dipetakan dalam kegiatan ini. Namun demikian, kegiatan ini belum secara spesifik menangkap tantangan partisipasi dan aksesibilitas bagi kelompok perempuan, pemuda dan manula penyandang disabilitas. Begitu pula dengan tantangan berdasarkan wilayah. Peta yang diperoleh masih dominan Jawa dan nasional. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan lagi pemetaan tantangan, peluang dan rekomendasi yang mencakup representasi wilayah, gender dan inklusi sosial secara merata.

BAB III
PENGELOLAAN PENGETAHUAN IDEA



AGENDA PRIORITAS 6

PENGUATAN PENGGALANGAN SUMBERDAYA



Pelatihan menjadi fasilitator kepada kelompok perempuan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang | Doc IDEA, 2022.

Rencana strategis IDEA Tahun 2022-2027 memandatkan IDEA harus memiliki strategi dan panduan penggalangan sumber daya (resource mobilization), termasuk sumber dana, sumber daya manusia (relawan) dan jaringan sebagai upaya berkesinambungan mencapai visi IDEA. Kedepan IDEA akan mengambil peran Co-Management (manajemen bersama) dengan membentuk kelompok-kelompok kolaboratif dalam forum multi stakeholder untuk mewadahi kepentingan semua pihak terutama masyarakat rentan. Agenda tersebut pada kurun waktu tahun 2022 diupayakan dengan Peningkatan kerja sama dan mobilisasi sumber daya dengan pihak luar dengan mendorong Kerja sama dengan para pihak untuk mewadahi kepentingan semua pihak, terutama warga terdampak.

KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta diawali dengan penandatanganan MoU antara IDEA dengan Universitas AMIKOM Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2022. Ruang lingkup kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang mahasiswa. Tindak lanjut setelah MoU adalah menjadi Dosen tamu mata kuliah advokasi sosial yang diisi oleh Ahmad Hedar. Selain itu, kegiatan magang mahasiswa Pengiriman mahasiswa magang AMIKOM ke komunitas Pinilih untuk pendampingan pembuatan marketplace ramah disabilitas.

Kerjasama dengan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh diawali dengan penandatanganan MoU pada tanggal 29 Maret 2022. Ruang lingkup kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang mahasiswa.



Kunjungan belajar program studi ilmu pemerintahan universitas Amikom Yogyakarta ke kantor IDEA, Jumat (01/07). Doc IDEA, 2022.

PENGEMBANGAN UNIT USAHA ANALITIKA INDONESIA KONSULTAN (AIK)

Sejak Unit Usaha ini didirikan Tahun 2015, AIK telah melayani lebih dari 150 jenis kegiatan dengan layanan berupa jasa riset baseline, monev program, assessment, penyusunan kajian kebijakan, pembuatan modul, fasilitator pelatihan dan lain sebagainya. Jenis isu yang dilayani adalah isu desa, kebijakan perencanaan dan penganggaran, pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, industri ekstraktif, energi terbarukan, Pengarusutamaan GEDSI, pemberdayaan masyarakat, penguatan organisasi, manajemen organisasi dan keuangan, dan isu yang relevan.

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

Jaringan Global

- IBP (International Budget Partnership)
- PWYP (Publish What You Pay) Global
- OGP (Open Government Partnership)

Jaringan Nasional

- PWYP (Publish What You Pay) Indonesia-Anggota dan Badan Pengarah serta wakil CSO EITI Tahun 2022-2025.
- FOINI (Freedom of Information Network Indonesia)-Anggota
- INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)-Anggota
- JMK (Jejaring Mitra Kemanusiaan)-Koordinator Pilar 3
- PLANAS PRB (Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana)
- KMSTP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan)-Anggota
- MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)-Anggota
- LOKADAYA-Anggota

Jaringan Lokal

- Forum LSM DIY- Dewan Pengawas
- Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) DIY-Anggota dan Pengurus Divisi Pengelolaan Pengetahuan
- AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta)-anggota
- SONJO (Sambatan Jogja)-anggota
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY-anggota pokja Pemberdayaan masyarakat
- Tim Ketahanan Ekonomi DIY-anggota pokja.

AGENDA PRIORITAS 7

PENINGKATAN LAYANAN IDEA SEBAGAI PENYEDIA INFORMASI DAN PRODUK PENGETAHUAN UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ADVOKASI

Pencapaian agenda prioritas 7 dilakukan dengan strategi Mendukung proses advokasi dan dialog dengan penyediaan informasi dalam berbagai bentuk sesuai target penerimanya, mendorong penyebaran informasi yang ramah, mudah diakses dan digunakan bagi kelompok sasaran, tersedianya sistem pengelolaan pengetahuan (pengumpulan, analisis dan distribusi) dan tersedianya sistem monitoring penggunaannya. Selain itu, penggunaan pengetahuan dari IDEA untuk pengembangan program dan advokasi oleh IDEA maupun pihak lain juga sudah dilaksanakan dan menyediakan layanan yang lebih luas dengan inovasi pemanfaatan teknologi (digital).

Usia IDEA yang sudah cukup matang menjadikan posisi IDEA sebagai organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat diakui oleh para mitra dan pemangku kepentingan. Salah satu topik yang sering menjadi pembahasan di komunitas dan jaringan masyarakat sipil di DIY adalah minimnya pengawasan publik atas penggunaan dana keistimewaan DIY. Dengan demikian, eksistensi IDEA sebagai aktor yang berperan mengawasi penggunaan danais diapresiasi oleh banyak pihak. Minimnya pengawasan dari publik dan diskusi maupun debat publik penggunaan danais DIY berdampak tingginya minat publik untuk berdiskusi dan membahas efektivitas penggunaan danais. Ke depan, diharapkan semakin banyak ruang-ruang diskusi dan model-model pengawasan penggunaan danais yang melibatkan masyarakat dan mendapatkan respon cepat dari pemerintah DIY dan para pengambil kebijakan lainnya.

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAERAH DENGAN OTONOMI KHUSUS-KEISTIMEWAAN DI INDONESIA

Implikasi dari kebijakan otonomi khusus dan keistimewaan adalah bertambahnya alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung implementasi otonomi sesuai bidang masing-masing. Artinya, selain memiliki anggaran pendapatan tetap melalui alokasi dana APBD, daerah dengan otonomi khusus juga mendapatkan alokasi tambahan yang didapat dari pemerintah pusat sebagai bagian dari dukungan kebijakan otonomi khusus. Hal tersebut terjadi di Provinsi DIY, Aceh dan Papua.

Stimulus anggaran memang memberikan manfaat untuk mengembangkan program sesuai dengan kekhususan di tiga daerah tersebut. Namun, di sisi lain, adanya sumber pendanaan baru yang secara nilai cukup besar, juga meningkatkan potensi penyalahgunaan. Hal tersebut seperti menjerat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sebagai tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran ialah keterbukaan informasi atau transparansi. Keterbukaan informasi dapat membuka akses publik untuk memantau secara langsung penggunaan anggaran daerah, termasuk anggaran otonomi khusus. Oleh karena itu, IDEA berupaya melakukan kajian untuk memotret bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di daerah dengan otonomi khusus, sebagaimana mandat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik di daerah dengan otonomi khusus, dapat mengunjungi website IDEA.



ANALISIS ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN RESPONSIF GENDER DI DIY

Pada tahun 2022, berinisiatif untuk mendokumentasikan hasil analisis kebijakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan responsif gender di Provinsi DIY, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Buku ini disusun untuk memotret kebijakan anggaran pro poor dan pro gender di provinsi DIY dan seluruh kabupaten/kota di DIY. Selain itu, hasil pendokumentasian analisis ini juga sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pemerintah provinsi DIY dan seluruh kabupaten/kota, khususnya dalam penganggaran program pro poor dan pro gender. Secara khusus, buku ini belum diterbitkan, namun sebagai rekomendasi kebijakan, hasil analisis dalam buku ini sudah disampaikan ke pemangku kepentingan di level provinsi dan kab/kota di DIY.

"Kebijakan pembangunan di Indonesia secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, negara wajib menanggulangi kemiskinan yang telah mengikis kesejahteraan rakyatnya. Ada tiga isu yang saling berkelindan yaitu kemiskinan, perempuan dan anggaran pembangunan. Ketiga isu ini melibatkan isu gender yaitu suatu konstruksi sosial yang mengatur bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial budaya.

Aspek gender menjadi aspek penting dalam diskusi penanggulangan kemiskinan karena konstruksi sosial tentang gender ini telah menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Hal ini mengakibatkan perempuan dan laki-laki mengalami kemiskinan yang berbeda. Data PBB menyebutkan bahwa dari 1,3 milyar penduduk dunia yang termasuk kategori miskin absolut, 70%-nya adalah perempuan. Ketimpangan gender memperparah kemiskinan khususnya perempuan dan sebaliknya kemiskinan berkontribusi mempertajam ketimpangan gender.

emiskinan merupakan permasalahan multidimensional, oleh karenanya untuk mengatasi masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai aspek termasuk diantaranya aspek gender. Dalam konteks anggaran pembangunan maka penyusunannya harus berperspektif gender, tak terkecuali anggaran penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang mencantumkan bahwa perempuan dalam perbandingan relatif dengan laki-laki, memiliki kendala lebih besar dalam mengakses hak dasar. Hal ini disebabkan, pertama karena kemiskinan mereka, kedua karena konstruksi sosial yang memarginalkan perempuan. Oleh karenanya, muncul regulasi berupa Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan gender".

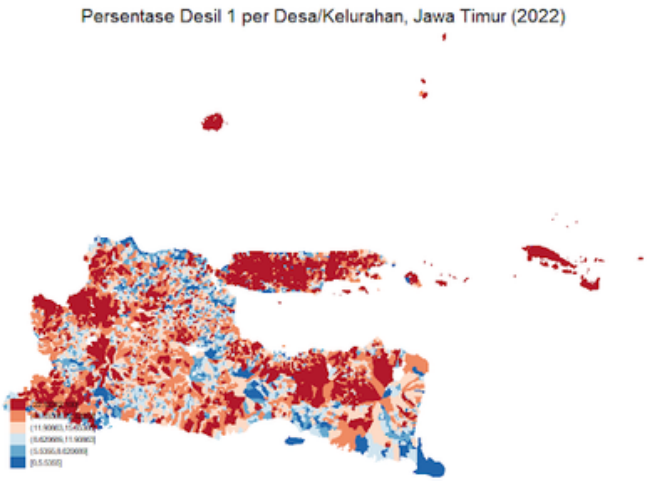
ANALISIS DATA SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

IDEA bersama dengan tim program asistensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim melakukan analisis data sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dan policy brief untuk rekomendasi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini penting untuk memastikan kualitas data sasaran.

Gambaran kondisi kemiskinan saat ini penting untuk digunakan sebagai bahan inputan; untuk mengetahui capaian tahun ini relatif terhadap tahun sebelumnya, juga untuk mengetahui posisi relatif terhadap daerah lainnya. Gambaran saat ini juga penting untuk digunakan untuk menentukan prioritas dan sasaran, sehingga sumberdaya dapat dialokasi secara efisien kepada yang membutuhkan.

Lingkup dari laporan ini adalah mendokumentasikan hasil dan temuan dari kegiatan analisis data kemiskinan di Jawa Timur. Secara spesifik, apa yang dilakukan dalam kerangka kerja tersebut adalah:

- Menganalisis data P3KE, dengan fokus pada karakteristik kelompok Desil 1;
- Mengidentifikasi dan menganalisis potential inclusion error berdasarkan data P3KE. Banyak program yang ditujukan pada keluarga miskin/ rentan miskin, namun kenyataannya ada yang diterima juga oleh keluarga di desil-desil atas (3 dan 4+).
- Mengidentifikasi dan menganalisis exclusion error berdasarkan data P3KE. Exclusion error pada laporan ini merujuk pada kondisi dimana keluarga desil 1, yang seharusnya menjadi target sasaran program kemiskinan, namun tercatat tidak menerima (0, nol) program pada data P3KE.
- Mengagregasi data P3KE pada level desa dan memadankannya dengan berbagai data level desa, seperti: Potensi Desa dan IDM. Output dari tahap ini adalah mengetahui karakteristik lokal dimana masyarakat tinggal, sehingga dapat dianalisis kemungkinan pengaruh karakteristik lokal wilayah pada kondisi kemiskinan masyarakat
- Mengidentifikasi dan menganalisis data secara kewilayahan (spatial) untuk mengidentifikasi kantong-kantong (clusters) kemiskinan.

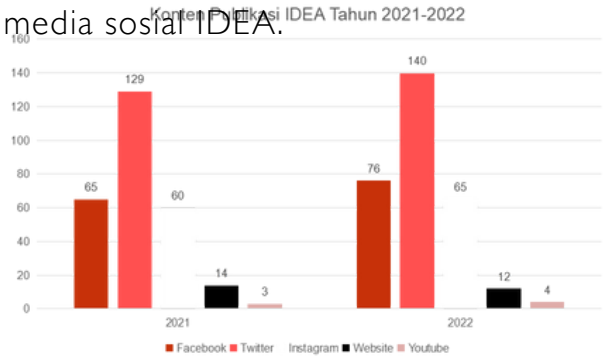


Ket: Agregasi data P3KE pada level desa. Persentase rata-rata Desil 1 di tiap desa adalah 14,5% dan desa-desa dengan rata-rata Desil 1 lebih besar dari 22,5% diplot berwarna merah pada peta.

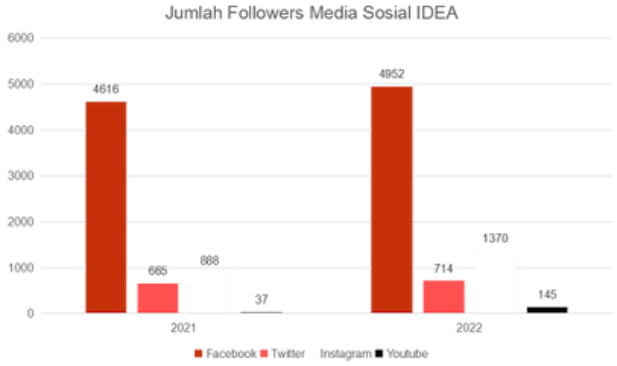
IDEA DALAM MEDIA

Dalam kurun waktu periode tahun 2022, IDEA dalam media fokus mendiseminasikan kerja-kerja IDEA ke khalayak luas, terutama media sosial dan website. Selain itu, juga membangun kolaborasi dengan media mainstream agar memuat hasil analisis, temuan maupun riset IDEA, sehingga perspektif-perspektif IDEA dapat dibaca publik secara luas dan meningkatkan eksposur IDEA. Jenis-jenis konten yang dipublikasi antara lain meliputi kegiatan program, hasil analisis dan konten kampanye tentang isu demokrasi dan akuntabilitas.

Publikasi dilakukan untuk memberikan edukasi, penyebaran konten pengetahuan, serta mempengaruhi persepsi public tentang isu-isu strategis IDEA. Selain itu, publikasi juga dilakukan untuk mainstreaming dan branding IDEA ke pihak-pihak terkait, seperti kelompok warga, pemerintah, jurnalis serta donor-donor yang mengikuti media sosial IDEA.



Dalam satu tahun terakhir, media sosial idea mengalami trend perkembangan yang baik. Dari sisi followers, facebook masih menjadi platform dengan followers terbanyak diikuti instagram dan twitter. Dari sisi perkembangan followers, instagram IDEA menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari 2021 ke tahun 2022. Followers di media sosial idea, secara keseluruhan merupakan followers Non Boot yang bersifat organik. Hal tersebut dapat dilihat dalam statistik followers berikut ini.



BAB IV
TATA KELOLA KELEMBAGAAN IDEA



AGENDA PRIORITAS 7

PENGUATAN TATA KELOLA LEMBAGA SEBAGAI PERKUMPULAN YANG SOLID DAN BERKELANJUTAN

PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Selama kurun waktu Tahun 2022, pegiat IDEA terlibat dalam beberapa kegiatan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk pelatihan, coaching clinic, maupun exercise simulasi bencana. Secara organisasi, IDEA juga telah memiliki panduan pengelolaan SDM yang dapat - digunakan sebagai landasan dalam memetakan kebutuhan SDM untuk keberlanjutan organisasi. Berikut ini adalah agenda penguatan kapasitas yang diikuti oleh staf IDEA pada Tahun 2022-2024:

WAKTU	KEGIATAN	PENYELENGGARA	STAF YANG TERLIBAT
21-24 Maret 2022	Pelatihan Pengelolaan dan Strategi Keuangan Organisasi Non Laba Seri-IV Perpajakan Bagi Organisasi Non Laba	PWYP	Sari Biwantari
22 September 2022	Coaching Clinic Penyajian Laporan Keuangan ISAK 35 menggunakan Smart Excel	PWYP	Sari Biwantari, Nani Wudjiyanti
15 November 2022	Manajemen Aset Tetap	PWYP	Hedar dan Tenti

PENGELOLAAN PROGRAM MAGANG (INTERNSHIP PROGRAM)



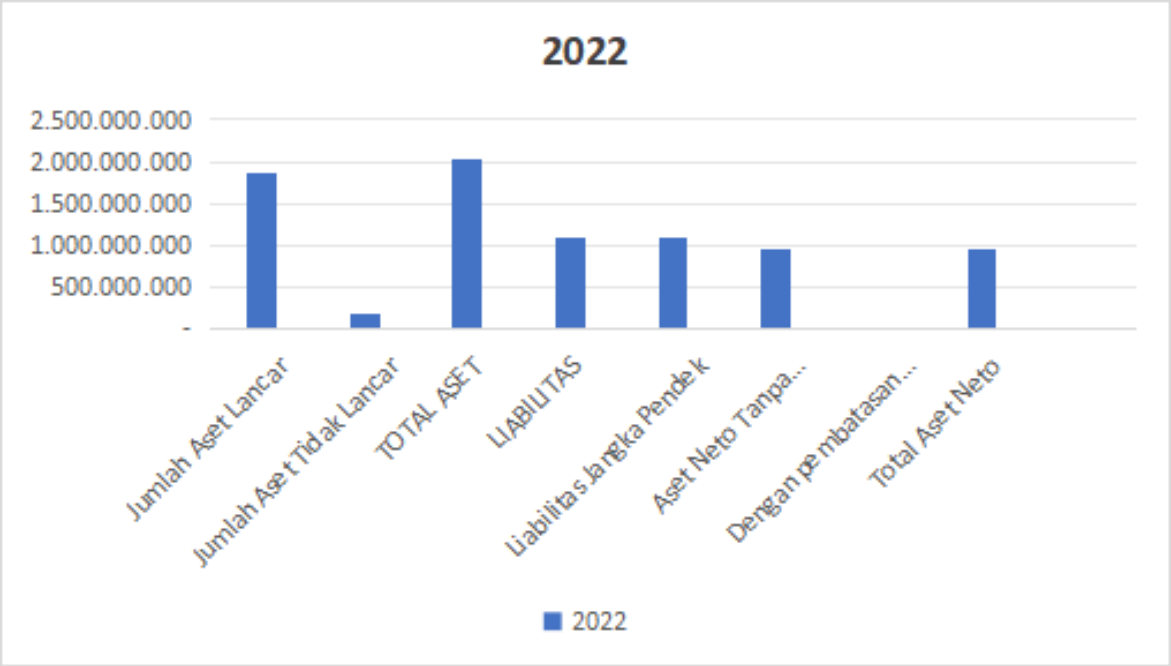
Gambar: Diskusi program magang antara IDEA dengan mahasiswa dari Princeton University di kantor IDEA tahun 2022.

Internship program adalah upaya pengembangan sumberdaya manusia untuk mencetak kader-kader pejuang perubahan sosial maupun ruang belajar bagi orang muda yang ingin memperkuat kapasitasnya dalam advokasi kebijakan. Melalui program ini, IDEA juga mendapat eksposure di beberapa universitas, baik di dalam dan luar negeri. Dari sisi internal, Internship program membantu kerja-kerja IDEA, terutama untuk analisis data dan produksi konten pengetahuan.

Tahun 2022-2023 mahasiswa yang magang ialah Katriona. Ia Mahasiswa asal Miami, Amerika Serikat. Selama Magang ia tertarik untuk mempelajari isu lingkungan dan keadilan gender. Ada beberapa produk magang yang ia hasilkan, diantaranya ialah flyer dan artikel tentang keadilan gender dalam pembangunan di Indonesia

KINERJA KEUANGAN IDEA

DANA PROGRAM YANG DIKELOLA IDEA TAHUN 2022



Dalam kurun waktu tahun 2022, IDEA telah menyelesaikan laporan keuangan Tahun 2022 dan 2023 yang sudah diaudit oleh Auditor Independen KAP Drs.Henry Susanto Akt., CPA., CA., CPI. & Sugeng dengan opini wajar. Opini wajar tersebut dalam hal semua yang material, laporan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Arus Kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

REFLEKSI DIRI

IDEA menjaga kontribusinya dalam upaya menyelesaikan prioritas persoalan eksklusi sosial kelompok rentan, bukan lagi menempatkan kelompok rentan sebagai objek, lebih pada memantik mereka berinisiatif dan memampukan untuk mengendalikan tekanan yang ada pada diri mereka. Situasi rentan yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat mengindikasikan masih terdapat celah problematik dalam mewujudkan kesejahteraan berlandaskan keadilan sosial.

IDEA tidaklah mandiri dalam mengoptimalkan gerakan advokasi dan perubahan sosial. IDEA mengedepankan konstruksi kolaborasi multi aktor, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun kelompok rentan itu sendiri. Tiga indikator kesejahteraan yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan ekologi dan demokrasi dan tata kelola telah terakomodasi dengan terlaksananya 8 (delapan) rumpun program guna menuntaskan semangat pembangunan inklusif.



JL. TUNJUNG 10, BACIRO, GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA 55225